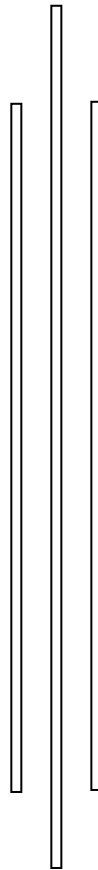




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2014

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	3
Laporan Realisasi Anggaran	4
Neraca	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	
- BAB I Pendahuluan	6
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja	10
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	11
- BAB IV Kebijakan Akuntansi	14
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	18
- BAB VI Penjelasan Tambahan	32
Lampiran – lampiran	33

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 2014

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blitar

(ACHMAD LAZIM,SE,MM)

NIP.19600805 198903 1 013

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2014 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 0,00 mencapai 0,00% dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0,00% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 6.753.390.290 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 435.000, investasi jangka panjang sebesar Rp 0, aset tetap sebesar Rp 6.229.774.290, dana cadangan Rp 0 dan aset lainnya sebesar Rp 523.181.000

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 0 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 0, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 6.753.390.290 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 435.000 ekuitas dana investasi sebesar Rp 6.752.955.290, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp 0.

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2014, SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar mempunyai 7 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Fasilitasi pindah/purna Tugas PNS;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- g. Program Pengembangan Data/Informasi Pegawai.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar Rp 8.286.701.525,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	8.021.381.524,00
2	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	265.320.000,00
	Surplus/(Defisit)	8.286.701.525,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.20.07.01 tanggal 2014 sebesar Rp.8.286.701.525,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp.8.286.701.525,00. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
	- <i>Pendapatan Asli Daerah</i>	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	0,00	0,00	0,00
	- <i>Belanja Operasi</i>	8.021.381.525,00	5.822.846.154,00	72,59
	- <i>Belanja Modal</i>	265.320.000,00	257.022.000,00	96,87
	- <i>Belanja Tak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	8.286.701.525,00	6.079.868.154,00	73,37

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2014 mencapai hasil 00,00 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dicapai dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal yaitu sebesar Rp.0,00 dari target sebesar Rp.0,00 atau 00,00 persen.

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp.6.079.868.154,00 atau 73,37 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.2.206.833.371,00 atau 26,63 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	2.558.702.000,00	2.278.649.174,00	89,05
2	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	373.271.265,00	259.119.565,00	69,41
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289.370.599,00	280.321.144,00	96,87
4	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	45.037.500,00	40.872.500,00	90,75
5	Pemindahan Tugas PNS	9.680.000,00	9.041.350,00	93,40
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	52.582.500,00	39.572.500,00	75,26
7	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD	1.038.072.500,00	0,00	0,00
8	Peningkatan Kapasitas dan Motivasi Pegawai BKD Kab. Blitar	231.377.886,00	223.513.550,00	96,60
9	Diklat Pajak Bumi Bangunan	70.872.500,00	65.113.500,00	91,87
10	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD/Pengiriman Diklatpim	44.185.000,00	44.185.000,00	100,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	139.907.500,00	138.506.580,00	98,99
12	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	77.575.000,00	62.250.500,00	80,25
13	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	69.955.000,00	55.732.700,00	79,67
14	Bimtek Akuntansi Keangan Daerah Berbasis Akrua	477.000.000,00	283.279.000,00	59,39
15	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.643.125,00	4.572.250,00	98,47
16	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	152.650.000,00	83.892.350,00	54,96
17	Seleksi Penerimaan CPNS	698.757.500,00	496.117.290,00	71,00
18	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	227.892.000,00	177.058.210,00	77,69
19	Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	61.090.000,00	60.175.000,00	98,50
20	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS	56.227.500,00	48.657.500,00	86,54
21	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	2.235.000,00	2.060.000,00	92,17

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
22	Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	12.950.000,00	11.835.000,00	91,39
23	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	1.282.994.400,00	1.161.502.180,00	90,53
24	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00	0,00
25	Pemrosesan Penanganan LP2P	23.288.750,00	21.648.750,00	92,96
26	Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Bapertarum dan Konversi NIP	23.344.000,00	20.232.500,00	86,67
27	Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS	16.760.000,00	15.320.000,00	91,41
28	Proses Pengambilan Sumpah PNS	9.297.500,00	6.435.000,00	69,21
29	Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	18.670.000,00	15.620.000,00	83,66
30	Pembinaan PNSD	14.550.000,00	2.725.000,00	18,73
31	Pengangkatan GTT/PTT menjadi CPNS	179.565.000,00	151.444.765,00	84,34
32	Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai	13.447.500,00	9.665.296,00	71,87
33	Penyusunan Produk Data kepegawaian	10.750.000,00	10.750.000,00	100,00
	Total	8.286.701.525,00	6.079.868.154,00	73,37

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpan Alat Tulis Kantor dan Barang Milik Negara;
- Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) Dokumen Anggaran (RKAP,DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan Anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedungan dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan persediaan sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
a. Aset	6.753.390.290,00	6.478.911.790,00
Saldo Aset SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.753.390.290,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(1)	Aset Lancar	435.000,00	457.000,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	6.229.774.290,00	6.330.599.790,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	523.181.000,00	147.855.000,00
Jumlah Aset		6.753.390.290,00	6.478.911.790,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Aset Lancar	435.000,00	457.000,00
Saldo Aset Lancar SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar 435.000,00, dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	435.000,00	457.000,00
Jumlah		435.000,00	457.000,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(b) Piutang Retribusi	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00,

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(d) Persediaan	435.000,00	457.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar.yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2014 sebesar Rp 435.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	405.000,00
(2)	Materai	30.000,00
	Jumlah	435.000,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitarper 31 Desember 2013sebesar nihil.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Aset Tetap	6.229.774.290,00	6.330.599.790,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 6.330.599.790,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.229.774.290,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Tanah	4.001.400.000,00	4.001.400.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	1.790.861.290,00	1.891.686.790,00

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(c)	Gedung dan Bangunan	437.513.000,00	437.513.000,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset		6.229.774.290,00	6.330.599.790,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2014 sebesar (100.825.500,00) diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2013 (Rp 6.229.774.290,00 – Rp 6.330.599.790,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(a) Tanah	4.001.400.000,00	4.001.400.000,00

Saldo Tanah SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.001.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **4.001.400.000,00**

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	

Pengurangan Aset Tetap Tanah

Penghapusan	(0)
Mutasi	(0)
Hibah	(0)
Reklasifikasi	(0)
Koreksi	(0) +
Jumlah Pengurangan	(0) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014 **4.001.400.000,00**

Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 6 *Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	1.790.861.290,00	1.891.686.790,00
Saldo peralatan dan mesin SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.790.861.290,00 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada <i>lampiran mutasi asset tetap 2014</i>		
Saldo Awal Per 1 Januari 2014		1.891.686.790,00
Penambahan Peralatan dan Mesin		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Modal	197.237.000,00	
Hibah		
Mutasi	14.949.000,00	
Reklasifikasi	135.987.500,00	
Koreksi	57.258.000,00 +	
Jumlah penambahan		405.431.500,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin		
Penghapusan	(0)	
Mutasi	(0)	
Hibah	(0)	
Reklasifikasi	(451.528.500,00)	
Koreksi	(54.728.500,00) +	
Jumlah Pengurangan		(506.257.000,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		1.790.861.290,00

Rincian perolehan asset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 7 *Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	437.513.000,00	437.513.000,00

Saldo gedung dan bangunan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp 437.513.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **437.513.000,00**

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan

Pengurangan Gedung dan Bangunan

Penghapusan (0)

Mutasi (0)

Hibah (0)

Reklasifikasi (0)

Koreksi (0) +

Jumlah Pengurangan **(0) +**

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014 **437.513.000,00**

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Modal	
Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+
Jumlah penambahan	

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(0)	
Mutasi	(0)	
Hibah	(0)	
Reklasifikasi	(0)	
Koreksi	(0) +	
Jumlah Pengurangan		(0) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 *Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2010</u> <u>(Rp)</u>
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Hibah	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Koreksi	+

Jumlah penambahan

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Penghapusan	(0)
Mutasi	(0)
Hibah	(0)
Reklasifikasi	(0)
Koreksi	(0) +

Jumlah Pengurangan (0) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014

Rincian perolehan aset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2010 (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 Nihil sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KONSTRUKSI	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Misal: Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi	0,00	0,00
2			
	JUMLAH	0,00	0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 (*nihil*)

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
5) Aset Lainnya	523.181.000,00	147.855.000,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp 147.855.000,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 523.181.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	207.640.000,00	147.855.000,00
(b)	Aset Lain-lain	315.541.000,00	0,00
Jumlah Aset		523.181.000,00	147.855.000,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2014 sebesar 375.326.000,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2013 (Rp 523.181.000,00-Rp147.855.000,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	207.640.000,00	147.855.000,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp 207.640.000,00 merupakan *software/perangkat lunak* dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014

Penambahan Aset Tak Berwujud 147.855.000,00

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal 59.785.000,00

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan 59.785.000,00

Pengurangan Aset Tak Berwujud

Penghapusan (0)

Mutasi (0)

Hibah (0)

Reklasifikasi (0)

Koreksi	(0) +	
Jumlah Pengurangan		(0) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		207.640.000,00

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(b) Aset Lain-lain	315.541.000,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp 315.541.000,00, terdiri dari *Aset Tetap yang rusak sebesar Rp 315.541.000.00, Aset Tetap yang telah dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp0,00, ,* dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **0**

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal 315.541.000,00

Hibah

Mutasi

Reklasifikasi

Koreksi +

Jumlah penambahan

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan (0)

Mutasi (0)

Hibah (0)

Reklasifikasi (0)

Koreksi (0) +

Jumlah Pengurangan (0) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014 **315.541.000,00**

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp315.541.000,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	960.000,000	
2	Alat kantor lainnya	840.000,00	
3	Mebelair	1.920.000,00	
4	Alat Rumah Tangga lainnya	1.960.000,00	
5	Personal Komputer	209.000.000,00	
6	Peralatan Komputer Mainframe	8.416.000,00	
7	Peralatan Personal komputer	73.205.000,00	
8	Peralatan Studio Visual	240.000,00	
9	Peralatan studio video dan film	19.000.000,00	
Jumlah		315.541.000,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2014 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongkan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1			
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00
Saldo Kewajiban SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014adalah sebesar (nihil) Rp0,00.		

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 (*nihil*) Rp0,00.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
c. Ekuitas Dana	6.753.390.290,00	6.478.911.790,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.753.390.290,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	435.000,00	457.000,00

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp435.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	0,00
(b)	Cadangan Persediaan	435.000,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		435.000,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	6.752.955.290,00	6.478.454.790,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.752.955.290,00 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	6.229.774.290,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	523.181.000,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		6.752.955.290,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

2. **PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
b. Belanja	0,00	0,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2014SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2014 sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Belanja Operasi	5.822.846.154,00	5.895.895.677,00

Belanja Operasi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2014 Rp 5.822.846.154,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
(a)	Belanja Pegawai	3.037.267.000,00	2.664.043.174,00	2.763.727.869,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	4.984.114.525,00	3.158.802.980,00	3.132.167.808,00
Jumlah		8.021.381.525,00	5.822.846.154,00	5.895.895.677,00

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar realisasi tahun 2014 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	2.558.702.000,00	2.278.649.174,00	2.170.277.869,00
	Gaji dan Tunjangan	2.476.902.000,00	2.207.949.174,00	2.099.732.869,00
	Tambahan Penghasilan PNS	81.800.000,00	70.700.000,00	70.545.000,00

1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	2.558.702.000,00	2.278.649.174,00	2.170.277.869,00
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	478.565.000,00	385.394.000,00	593.450.000,00
	Honorarium PNS	435.265.000,00	348.065.000,00	280.370.000,00
	Uang lembur	43.300.000,00	37.329.000,00	313.080.000,00
	Belanja Barang/Jasa	4.984.114.525,00	3.158.802.980,00	3.132.167.808,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	133.369.600,00	114.332.748,00	129.329.910,00
	Belanja Bahan/Material	74.033.500,00	72.976.000,00	0,00
	Belanja Jasa Kantor	868.050.000,00	645.543.789,00	0,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.486.539,00	57.778.644,00	0,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.859.000,00	183.614.175,00	0,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	640.400.000,00	571.447.500,00	0,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	117.789.000,00	104.595.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman	433.852.500,00	369.491.000,00	502.677.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.136.685.000,00	816.674.124,00	896.971.855,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	74.000.000,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.149.589.386,00	172.000.000,00	365.250.000,00
	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	8.850.000,00	33.645.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	40.000.000,00	271.325.000,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	5.727.999.525,00	3.801.218.980,00	3.909.816.808,00
Jumlah 1 dan 2		8.286.701.525,00	6.079.868.154,00	6.080.094.677,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp.0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Belanja Modal	257.022.000,00	184.199.000,00

Belanja Modal SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2014 Rp 257.022.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	0,00	0,00	14.135.000,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	0,00	0,00	24.750.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop	0,00	0,00	38.544.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	0,00	1.980.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Software	0,00	0,00	98.300.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,00	0,00	6.490.000,00
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	37.670.000,00	31.500.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	3.960.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	209.650.000,00	207.702.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000,00	13.860.000,00	0,00
	Jumlah 2	265.320.000,00	257.022.000,00	184.199.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	265.320.000,00	257.022.000,00	184.199.000,00

- Jumlah tersebut termasuk:
- Realisasi Belanja Modal 257.022.000,00 berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex : Belanja Peralatan dan Mesin Rp257.022.000,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00*).

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

SKPD Badan Kepegawaian Daerah pada penyusunan Laporan Keuangan 2014 telah melakukan penyesuaian rekening asset tetap sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 untuk data neraca awal tahun 2014 sehingga asset tetap pada SIMDA dan SIMBADA dapat dibandingkan.

Proses perubahan Rekening Aset Tetap tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca Per 31 Desember 2013 (setelah Audit)
2. Hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara BPKAD dengan SKPD per 31 Desember 2013.
3. *Print Out* SIMBADA Rincian Barang Ke Neraca Tahun Anggaran 2013.

Adapun Berita Acara beserta Kertas Kerja penyesuaian rekening asset tetap terlampir

Blitar, Desember 2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blitar

ACHMAD LAZIM,SE,MM
NIP. 19600805 198903 1 013

